



LAPORAN BULANAN BP3OKP PAPUA SELATAN

AGUSTUS 2025



OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Agustus 2025 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Agustus 2025, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan. Capaian utama meliputi kesepakatan pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Musamus Merauke, penguatan sistem rujukan kesehatan dengan RSUP Jayapura, serta sinkronisasi RPJMD Provinsi Papua Selatan dengan indikator Otsus.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke, 10 September 2025

Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Joseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC

NIP: 999920240117145257



I. PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna memastikan percepatan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua. BP3OKP hadir untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus serta memastikan agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil masyarakat adat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator, penghubung, dan pengarah bagi program-program pembangunan daerah berbasis Otonomi Khusus. Melalui keterlibatan aktif para anggota dan kelompok kerja (Pokja), BP3OKP Papua Selatan terus mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur dasar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2025 oleh para anggota dan kelompok kerja BP3OKP Provinsi Papua Selatan. Laporan ini mencakup rincian kegiatan strategis, hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut guna mendukung terwujudnya Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif. Serta Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah otonom khusus berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.

II. TUJUAN

- a. Mendokumentasikan seluruh aktivitas Pokja dan anggota BP3OKP secara sistematis.
- b. Mengevaluasi capaian program kerja bulanan.
- c. Menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan bulan berikutnya.

III. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
- e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
- f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
- g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

IV. RUANG LINGKUP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun



2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan pelaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut :

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Menyusun basis data yang komprehensif dan *up-to-date* terkait hasil evaluasi dan monitoring program Otsus di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat..

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pokja Papua Cerdas.
- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarkan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.



V. RINCIAN KEGIATAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan, para anggota dan kelompok kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sepanjang bulan Agustus 2025. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan komitmen BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat adat, dan berlandaskan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Kegiatan yang dilakukan mencakup pelibatan dalam agenda nasional, koordinasi lintas lembaga, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta audiensi dengan kementerian/lembaga strategis. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Dana Otonomi Khusus secara lebih efektif dan menyeluruh, serta memastikan keterlibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan pembangunan.

Berikut ini adalah rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Anggota BP3OKP dan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama bulan Agustus 2025, beserta tujuan, lokasi, dan hasil/output yang dicapai.

A. Anggota BP3OKP/ BPP Papua Selatan

Rincian pelaksanaan kegiatan Anggota BPP-PPS, bulan Agustus tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Menghadiri Undangan RPJMN tanggal 8 Agustus 2025.

a. Output Kegiatan

- Pimpinan OPD mampu menerjemahkan visi misi dari gubernur agar visi misi tersebut bisa di implementasikan dengan baik agar bisa dilaksanakan tepat sasaran
- Informasi dari Menteri dalam negeri tentang evaluasi kinerja dari gubernur dan wakil gubernur akan dievaluasi setiap 3bulan sekali
- Pencapaian target dari gubernur dan wakil gubernur dapat dilihat dari dukungan seluruh OPD mulai dari staf, kepala seksi, kepala bidang dan kepala OPD harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan target-target dari Gubernur dan wakil gubernur yang sudah dituangkan dalam RPJMD, RPJP dan RPJMN
- Program didalam RPJMD, RPJP dan RPJMN harus terhubung dengan program RPJMD dan RPJP dalam daerah sampai kota sehingga alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif dan efisien
- Perencanaan suatu kegiatan di kabupaten atau kota harus dikoordinasikan dengan opd-opd terkait anatar provinsi dan kabupaten agar kegiatan itu tepat sasaran dan tidak tumpang tindih sehingga penggunaannya tepat sasaran, efektif, dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- Jabatan itu jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau perorangan karena jabatan itu adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang hatinya tulus yang akan melaksanakan amanah dengan baik didalam tugas dan pelayanan. Jabatan itu akan diberikan kepada orang-orang yang berkenan untuk menjadi seorang pelayan
- Jangan tanyakan kepada negaramu bangsamu apa yang akan diberikan kepadamu, tetapi tanyakan kepada dirimu apa yang akan kau berikan untuk bangsa, negara dan rakyatmu

b. Dokumentasi Kegiatan





2. Menghadirkan Kegiatan South Papua Culture Meet 12 Agustus 2025 dengan Tema Papua Bersatu, Indonesia Maju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu

a. Hasil / Output

- Yang dimaksud kampung terpadu adalah pola pembangunan harus diubah berbasis kampung

b. Dokumentasi Kegiatan



3. Kunjungan Kerja ke Boven Digoel 12 – 15 Agustus 2025

a. Output Kegiatan

1. Kegiatan tanggal 13 Agustus 2025

- Presentasi menjelaskan peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dalam Percepatan Pembangunan Papua.
- Menjelaskan tentang peran BP3OKP sesuai dasar hukum pembentukan BP3OKP Pasal 68A UU nomor 2 Tahun 2021, dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden
- Peran Badan Pengarah, pasal 4 Perpres 121/2022
 - 1) Pemberian arahan kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan Pembangunan
 - 2) Pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh K/L dan Pemda
 - 3) Pemberian pertimbangan, arahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis
 - 4) Pengendalian penyelenggaraan pembangunan dan Otsus berpedoman pada RIPP dan RAPP
- Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
- Tugas dan fungsi BP3OKP
 - 1) Pemberian arahan kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua
 - 2) Sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi serta pembinaan arahan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah Daerah Provinsi Papua
 - 3) Pemberian pertimbangan arahan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua
 - 4) Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk



Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Untuk jangka menengah (RAPPP)

- 5) Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua Kepada Presiden dan struktur organisasi BP3OKP
 - Peran BPP, Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam kebijakan tata Kelola Dana Otsus
 - Peran BPP dalam tata Kelola penerimaan dalam rangka Otsus amanat PP107/2021 Tentang Kelola penerimaan Dalam rangka Otsus.
 - 1) Pelaporan, pasal 39
 - 2) Pembinaan, pasal 40
 - 3) Pengawasan, pasal 42
 - 4) Pemantauan dan Evaluasi, Pasal 49
 - Pengawasan Tata Kelola Dana Otsus (Ps 40-41 PP 107/2021, Ps.90 PMK 33/2024)
 - Syarat Salur Dana Otsus yaitu RAP dan Laporan Tahun Sebelumnya
 - Pleno KPU PSU Boven Digoel
 - 1) Mengikuti dan menyaksikan Perhitungan Suara untuk Pemilihan Bupati di Boven Digoel
 - 2) Mengikuti PLENO KPU PSU Boven Digoel untuk Pemilihan Bupati
 - 3) Evaluasi dan Mitigasi Plan diskusi bersama KPU Kabupaten Boven Digoel, KPU Provinsi, Dandim, Kapolres, BIN dan Tokoh Masyarakat
 - 4) Evaluasi situasi Keamanan Pasca Pleno
2. Kegiatan tanggal 14 Agustus 2025 Kunjungan kerja ke sekolah-sekolah di Waropko dan Mindiptana
 - Ditemukan Asrama tempat tidur Siswa kurang memadai
 - Ditemukan Gedung Sekolah SMPN2 yang dibangun tidak digunakan untuk Proses Belajar mengajar
 - Rumah Guru dibangun untuk tempat tinggal Guru tetapi tidak ditempati oleh Guru karena rumah tersebut berada di Hutan, sehingga ditempati oleh Masyarakat
 - Ruang Kelas tidak ada Kursi dan Meja
 - SMPN 2 bangunannya tidak difungsikan sehingga Anak-anak SMPN2 sekolah menggunakan Ruang Kelas SMKN Mindipta
 - Tidak ada Rumah Guru, sehingga para guru harus Kontrak dan Kost
 - Sekolah tidak ada Pagar sehingga banyak Bintang liar yang berkeliaraan di Sekolah
 - Masih ditemukan Siswa-siswi OAP yang lulus masih ada Tunggakan berkisar antara Rp 1,000,000,- - 2,500,000,- di Sekolah sehingga belum mendapatkan IJAZAH
 - Pengelolaan Dana BOS harus di Evaluasi secara Total di Sekolah-sekolah agar penggunaannya tepat sasaran
 - Siswa-siswa di SMPN2 dan SMKN bersekolah tidak menggunakan Sepatu, alias sekolah Kaki kosong
 - Kepala Dinas Pendidikan Boven Digoel harus kooperatif didalam melaksanakan tugas bersama seluruh staff agar pelayanan yang diberikan harus maksimal kepada Siswa-siswi OAP
 - Pengelolaan Dana OTSUS Dinas Pendidikan Boven Digoel harus di Evaluasi dengan baik
 - Pendidikan Berpola Asrama harus digalahkan di Boven Digoel
 - Pemerataan Guru-guru antara Sekolah Negeri, Inpres dan Swasta harus dievaluasi agar tercover dengan baik
- b. Dokumentasi Kegiatan





4. Paparan Ketua BP3OKP Provinsi Papua Selatan Sebagai Narasumber pada kegiatan Seminar Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Selatan tanggal 20-22 Agustus 2025

- a. Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Menegaskan fungsi SHEK (*Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi*) sebagai inti kerja BP3OKP
 - BP3OKP bukan pelaksana teknis, melainkan penggerak orkestrasi kebijakan agar pembangunan Otsus tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP)
 - Memastikan program Otsus diintegrasikan dengan RIPPP 2025–2029 dan RAPP yang sedang disusun
 - Keterlambatan RAPBD: masih sering molor hingga pertengahan tahun, menghambat penyaluran Otsus
 - Regulasi Multitafsir: perbedaan tafsir UU, PP, dan petunjuk teknis membuat daerah bingung
 - Keterbatasan SDM: aparatur OPD belum optimal dalam perencanaan, pelaporan, dan pengawasan
 - Memperkuat Inspektorat Daerah agar aktif sejak tahap perencanaan; memanfaatkan alokasi 1% Dana Otsus untuk mendukung pengawasan
 - Mempercepat Perbup Pendataan OAP agar penyaluran Otsus berbasis data valid
 - Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengelolaan Otsus
 - Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengelolaan Otsus
 - Memfasilitasi rapat koordinasi rutin antara provinsi dan kabupaten
 - Peserta bertanya terkait keterlambatan RAPBD dan Koordinasi Pusat-Daerah. Bagaimana langkah konkret agar RAPBD tidak kembali terlambat.
 - Jawaban BP3OKP: Siap memimpin rapat koordinasi lintas OPD dan kabupaten secara periodik, serta memberikan pendampingan sejak penyusunan awal
 - Validasi data OAP terkait mekanisme percepatan pendataan yaitu dengan mendukung penerbitan Perbup khusus pendataan OAP dan menyiapkan skema kolaborasi dengan Dukcapil pusat
 - Menegaskan dukungan terhadap kebijakan penggunaan 1% Dana Otsus untuk memperkuat inspektorat dan pengawasan internal
 - Mendorong pelatihan teknis terpadu dan pendampingan berkelanjutan bersama Bappenas, Kemenkeu, dan BPKP
 - Materi dan diskusi BP3OKP pada berpusat pada peran strategis sebagai pengorkestra kebijakan Otsus, penguatan inspektorat, percepatan pendataan OAP, dan pembinaan SDM, disertai komitmen mengawal disiplin RAPBD dan transparansi penggunaan Dana Otsus
- b. Dokumentasi Kegiatan





5. Kegiatan Temu Alumni Binaan Binterbusi pada tanggal 24 Agustus 2025

a. Output Kegiatan

- Seluruh alumni diminta untuk diberikan sumbangan suka rela untuk membiayai mahasiswa/i dan siswa/i Papua Raya di Jawa dan dana ini dikelola oleh Yayasan Binterbusi
- Kepala daerah, Gubernur, Bupati dan seluruh OPD alumni Yayasan Binterbusi harus membuat MoU dengan Yayasan Binterbusi untuk mengalokasikan anggaran Pendidikan dari dana Otsus untuk mahasiswa/i dari 6 Provinsi di Papua.

b. Dokumentasi Kegiatan

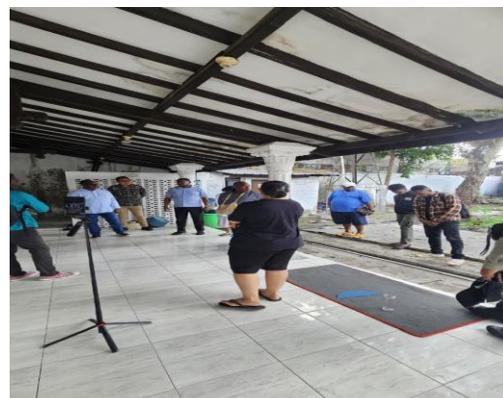


6. Kunjungan kerja bupati Merauke, Ketua MRP dan Kepala BP3OKP untuk inspeksi asrama Mahasiswa/i Merauke di Janti-Provinsi DIY pada tanggal 25 Agustus 2025

a. Output Kegiatan

- Kondisi asrama rusak berat perlu dilakukan renovasi total dan segera
- Perlu dibangun asrama putra untuk Provinsi Papua Selatan di Jogjakarta
- Sesuai janji bupati asrama Merauke akan direnovasi ditahun anggaran 2026 dan konsen ini sudah dilaporkan ke gubernur Provinsi Papua Selatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan sudah disetujui

b. Dokumentasi Kegiatan



B. Pokja Papua Sehat

Rincian pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat BPP-PPS, bulan Agustus tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Kunjungan ke RSUD Boven Digoel

a. Waktu dan Tempat

Dalam rangka memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan antar provinsi dan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di Papua Selatan, Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke RSUD Boven Digoel. Kegiatan ini dilakukan pada 11 Agustus 2025 bertempat di RSUD Boven Digoel dan bertujuan untuk menjalin kerja sama pelayanan rujukan antara provinsi induk dan daerah



otonomi baru (DOB), serta mengeksplorasi potensi pelatihan, rotasi klinis, dan penguatan sistem informasi rujukan digital.

b. Peserta Kegiatan

- Tim Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
- Tim Management RSUD Boven Digoel

c. Hasil Kegiatan

Aspek Operasional & Anggaran

- Alokasi Dana Otsus RSUD 2024: Rp 5,1 miliar (empat Sub-Kegiatan utama)
- Realisasi: Rp 4,84 miliar (95%)
- Rincian:
 - Pengadaan Alat Kesehatan: Rp 1,73 miliar (100% serapan)
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai: Rp 2,91 miliar (100% serapan)
 - Pengelolaan HIV/AIDS: Rp 109 juta (100% serapan)
 - Operasional RS: Rp 348 juta, realisasi hanya Rp 87,8 juta (3,9% serapan), namun dilaporkan 100% output. Rendahnya serapan operasional terjadi karena penyedia tidak mampu memenuhi pesanan (stok habis atau hampir kedaluwarsa). Komponen yang tidak terpenuhi antara lain Susu Bumil KEK (798 dos) dan Susu Gibur (870 dos)

Sarana dan Prasarana

- Rencana pengadaan CT Scan bertahap hingga 2027, dengan bantuan program Shiren
- Kebutuhan mendesak: ruang isolasi, air bersih, listrik cadangan
- Renovasi bangunan masih terbatas
- Alat penting belum tersedia: mortuary cabinet, outlet oksigen, mesin cuci infeksius

SDM Kesehatan

- Laporan RSUD menyebutkan tidak ada kekurangan signifikan, namun Pokja mencatat masih ada kekurangan dokter spesialis terutama untuk persiapan program shiren
- Insentif tenaga kontrak berupa uang jaga; PNS menerima TPP per triwulan masih kurang
- Perlu insentif tambahan bagi spesialis di wilayah 3T
- Ada peluang dukungan dari program Nusantara Sehat dan beasiswa tenaga medis namun SDM masih terbatas

Kapasitas Layanan

- Jumlah TT: 97
- BOR: 57,06% → di bawah standar ideal (60–85%)
- Layanan tersedia: spesialis (Radiologi, Anak, Bedah, Jiwa, dll) & non-spesialistik (UGD, gigi, keperawatan, farmasi, dll)
- RSUD menerima rujukan dari puskesmas; bila tidak memadai, pasien dirujuk ke RSUD Merauke/Provinsi

Sistem Rujukan & Pembiayaan

- RSUD hanya menerima rujukan langsung dari puskesmas
- Kendala: jarak dan akses jalan memperlambat rujukan
- Dinkes melakukan koordinasi saat ada rujukan
- Koordinasi BPJS masih administratif, kelengkapan dokumen dikoordinasi dengan puskesmas
- Pembiayaan OAP diterima melalui BPJS dan KPS

d. Rencana Tindak Lanjut

1. Analisis lanjut terkait pemanfaatan BOR untuk identifikasi faktor rendahnya keterisian TT (akses, sistem rujukan, kepercayaan pasien, jenis layanan)
2. Menyusun usulan resmi kebutuhan RSUD Boven Digoel ke Gubernur Papua Selatan dan Kementerian kesehatan untuk kebutuhan yang tidak terakomodir dari kabupaten
3. Mendorong PLN dan PUPR membantu pemenuhan listrik dan infrastruktur dasar



4. Memfasilitasi advokasi insentif tenaga medis bersama pemerintah daerah dan Kemenkes
 5. Melakukan audiensi lanjutan dengan Bappeda untuk sinkronisasi program RSUD DENGAN RPJMD
- e. Rekomendasi
1. Revisi perencanaan anggaran operasional RSUD agar pagu perlu realistis dan disesuaikan dengan kebutuhan riil, agar tidak ada alokasi besar yang tidak terpakai
 2. Perbaiki indikator output : harus proporsional dengan serapan dan mencerminkan layanan nyata, bukan administrative
 3. Optimalisasi kapasitas RSUD : strategi peningkatan BOR melalui promosi layanan unggulan, peningkatan transportasi rujukan, dan koordinasi antar puskesmas
 4. Pemerintah daerah dan provinsi perlu memberi perhatian pada kebutuhan RSUD dalam hal ini pada pengadaan CT Scan dan insinerator melalui Dana Otsus atau sumber dana lainnya
 5. Evaluasi bersama lintas OPD (Dinkes, Bappeda, BPKAD, Inspektorat) agar ke depan capaian output RSUD menjadi maksimal
 6. Kemenkes diminta memperkuat dukungan SDM melalui insentif bagi tenaga kesehatan di daerah 3T termasuk kabupaten Bouven Digoel
- f. Dokumentasi Kegiatan



2. Kunjungan Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel

a. Waktu dan Tempat

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting, penguatan program Keluarga Berencana, dan pembangunan kesehatan masyarakat di Papua Selatan, Pokja Papua Sehat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan ini dilakukan pada Agustus 2025. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperdalam sinergi antarlembaga serta memastikan keberlanjutan program nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.

b. Peserta Kegiatan

- Tim Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
- Tim Manajemen dan pejabat structural Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel

c. Hasil Kegiatan

Aspek Operasional dan Anggaran

- Dana Otsus Kesehatan 2024
 1. Pagu: Rp 17,518 miliar
 2. Realisasi: Rp 15,732 miliar (99,8%)
 3. Capaian output: 89,08%
 4. Catatan: Tingginya serapan keuangan belum sebanding dengan output hal ini menunjukkan adanya indikasi inefisiensi
- Program Spesifikasi 2024 Alokasi Anggaran untuk HIV, TB, Malaria:



1. TB: Rp 688,8 juta, realisasi 84,9%
 2. HIV: Rp 110,2 juta, realisasi 95,3%
 3. Malaria: Rp 1,36 M, realisasi 100%
 4. Catatan: Untuk penyakit menular, serapan relatif baik, bahkan ada yang 100%
- Dana Otsus Kesehatan 2025
 1. Pengadaan Obat Esensial: Rp 3,14 miliar → realisasi Rp 0
 2. Program Gizi – PMT Penyuluhan (20 Puskesmas): Rp 910,4 juta → realisasi Rp 0
 3. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK, 5 lokus): Rp 457 juta , realisasi Rp 0
 4. Intervensi Stunting (Rp 2,37 miliar): masih tahap laokasi, belum terealisasi
 5. Kendala utama: tahap salur baru diterima 23 Juli 2025 , program tertunda
 - Saran dan Prasarana
 1. Banyak Pustu dan sarana kesehatan dasar belum layak
 2. Kebutuhan mendesak: transportasi kesehatan untuk daerah pedalaman (contoh akses Yaniruma)
 3. Kepatuhan pelaporan ASPAK masih rendah
 4. Infrastruktur penunjang RTK masih minim (air bersih, listrik cadangan, logistik dasar)
 - SDM Kesehatan
 1. Masih ada kekurangan dokter umum dan dokter gigi sehingga tidak semua puskesmas memiliki dokter umum dan dokter gigi
 2. Insentif tenaga kontrak terbatas; PNS menerima TPP per triwulan, masih dinilai kurang
 3. Perlu tambahan insentif untuk tenaga kesehatan di wilayah 3T
 4. Rencana pendirian Poltekkes Papua Selatan di Boven Digoel untuk mendukung kebutuhan tenaga medis, sudah berproses dengan arahan bpk Gubernur namun masih terkendala dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten bouven digoel, lahan sudah siap
 - Kapasitas Layanan dan Program Prioritas
 1. Program gizi dan pemeriksaan kesehatan gratis di 20 Puskesmas sudah berjalan, namun kegiatan dan pelaporan belum optimal
 2. Penanganan stunting: telah dilakukan rembuk stunting, kegiatan intervensi gizi spesifik, aksi bergizi, Stop BABS, namun outcome belum maksimal
 3. Program pengendalian penyakit menular relatif stabil (2024):
 - TB: 84,9% realisasi
 - HIV: 95,3% realisasi
 - Malaria: 100% realisasi
 4. Kasus kesehatan jiwa (ODGJ) cukup tinggi, mayoritas OAP, namun belum ada fasilitas penampungan khusus, sehingga butuh koordinasi dengan dinas sosial
 - Sistem keuanagan, Data dan Rujukan.
 1. UP (Uang Persediaan) dari DAU, sementara kegiatan dibiayai Dana Otsus → keterlambatan salur berdampak langsung pada program
 2. Usulan peningkatan porsi Dana Otsus kesehatan karena dana alternatif terbatas
 3. Masalah sinkronisasi data: terdapat perbedaan angka Pusdatin dengan data lokus lapangan
 4. Validasi identitas OAP (dukcapil/PMK) memengaruhi akurasi sasaran
 5. Sistem rujukan masih menghadapi kendala jarak dan akses jalan. Koordinasi dengan BPJS lebih bersifat administratif
- d. Rencana Tindak Lanjut
- 1) Optimalisasi Realisasi 2025
 - Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat keterlambatan salur, terutama pengadaan obat esensial, PMT penyuluhan, RTK, dan intervensi stunting
 - Menggunakan SILPA 2024 untuk mendukung program prioritas yang belum berjalan.
 - 2) Perbaiki Manajemen Sarana dan Prasarana
 - Menyusun rencana renovasi bertahap untuk Pustu yang belum layak



- Memprioritaskan kebutuhan mendesak: transportasi kesehatan, air bersih, listrik cadangan.
- 3) Penguatan SDM Kesehatan
 - Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga dokter umum, dokter gigi, dan spesialis per Puskesmas.
 - Menyusun skema insentif tambahan khusus daerah 3T, termasuk fasilitas perumahan tenaga medis.
- 4) Advokasi Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan
 - Mengadvokasi pengalokasian anggaran daerah dan pusat untuk intervensi program KB dan stunting secara berkelanjutan di wilayah DOB.
 - Mendorong integrasi program KB dan stunting ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD Kabupaten).
 - Mempercepat proses pendirian Poltekkes Papua Selatan di Boven Digoel melalui koordinasi lebih intensif dengan pemerintah kabupaten.
- 5) Peningkatan Kapasitas Layanan dan Program Prioritas
 - Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting agar outcome lebih optimal.
 - Menyiapkan mekanisme monitoring penyakit infeksi (TB, HIV, Malaria) berbasis output dan outcome, serta memastikan logistik dan SDM memadai
 - Menyusun langkah khusus penanganan ODGJ bersama Dinas Sosial dan lintas sektor lain
- 6) Penguatan Sistem Keuangan, Data dan Rujukan
 - Melakukan koordinasi rutin dengan Pemprov Papua Selatan dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat mekanisme salur Dana Otsus.
 - Meningkatkan sinkronisasi data Pusdatin dengan data lokus lapangan melalui forum lintas OPD.
 - Mengintegrasikan validasi identitas OAP dengan Dukcapil untuk akurasi sasaran penerima manfaat.
 - Memperbaiki sistem rujukan kesehatan, termasuk memperluas akses jalan dan memperkuat koordinasi administratif dengan BPJS
 - Koordinasi terkait anggaran stunting, karena belum di laporkan ke BP3OKP

e. Rekomendasi

- 1) Pengelolaan Anggaran dan Efisiensi
 - Menetapkan target output yang realistis agar sejalan dengan realisasi anggaran
 - Mengurangi inefisiensi dengan memastikan belanja menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat
- 2) Sarana dan Prasarana
 - Melabelisasi kebutuhan prioritas (transportasi, air bersih, listrik cadangan) sebagai program mendesak Dana Otsus
 - Mengintegrasikan pelaporan ASPAK ke dalam mekanisme evaluasi kinerja OPD
- 3) SDM Kesehatan
 - Memberikan insentif khusus bagi tenaga medis di daerah 3T
 - Memastikan komitmen penempatan tenaga medis pasca-pendidikan, termasuk dukungan dari program Nusantara Sehat
- 4) Program Prioritas
 - Mengintegrasikan program gizi, stunting, dan pemeriksaan kesehatan dengan indikator outcome yang jelas
 - Menetapkan mekanisme pembiayaan khusus ODGJ dengan dukungan Dinsos
- 5) System Keuangan dan Data
 - Melakukan percepatan syarat administrasi tahap salur Dana Otsus
 - Membangun sistem data terpadu antara Pusdatin, Dukcapil, dan OPD daerah untuk menghindari bias perencanaan
- 6) Jaminan Kesehatan dan Rujukan



- Menambah alokasi Dana Otsus untuk mendukung pembiayaan rujukan pasien OAP
- Melakukan advokasi ke BPJS untuk penyesuaian standar biaya di wilayah 3T

f. Dokumentasi Kegiatan



3. FGD Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel bersama BP3OKP Papua Selatan

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025 dan bertempat di Kantor Bapeda Kabupaten Boven Digoel.

b. Peserta Kegiatan

- Perwakilan DPR Papua Selatan
- BP3OKP Papua Selatan
- Kepala OPD se Kabupaten Boven Digoel

c. Hasil Kegiatan

1) Pembahasan Umum

- Dana Otsus difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan infrastruktur dasar.
- SILPA:
Silpa besar akan memiliki risiko pemotongan alokasi 10%.
Silpa kecil maka peluang penambahan alokasi karena penggunaan dananya sangat baik
- Penyerapan anggaran menjadi indikator utama kinerja OPD dan pimpinan daerah

2) Evaluasi Laporan Tahunan

- Pelaksana evaluasi: KL teknis melalui Kemendagri dan Kemenkeu.
- Laporan wajib selesai Maret, namun 2024 baru rampung Mei–Juli.
- Komponen evaluasi: belanja wajib, juknis, SILPA, realisasi, capaian output.
- Fakta: dari 49 daerah penerima Otsus, tidak ada yang tepat waktu. Boven Digoel baru menyerahkan Juli.

3) Kompetensi Aparatur dan Regenerasi OAP

- Raport kinerja kepala daerah sangat dipengaruhi kualitas OPD
- OAP yang kurang kompeten perlu dibina, bukan disisihkan, sebagai strategi regenerasi

4) Isu Teknisi Administrasi

- Perubahan PMK 76 menjadi PMK 33 membuat review manual kembali sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan RAP dan Laporan tahunan
- Kendala SIPD: server pusat lambat respon sehingga input sulit dilakukan

5) Peran Inspektorat/APIP

- Saat ini review hanya sebatas administratif.
- Inspektorat perlu diperkuat sebagai mitra pendamping OPD.
- Rencana masuk Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2026 agar ada dasar anggaran untuk pengawasan substantif.



6) Catatan Khusus OPD:

- Dinas Sosial: realisasi 96%, output 77,5%. Terkait rujukan Non OAP dan OAP, Perlu alokasi untuk layanan jenazah OAP miskin dan BPJS Ketenagakerjaan mandiri
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A): realisasi 98,7%, output 66%. Kendala: narasumber & kasus rujukan KDRT non OAP sehingga dinas tidak berani membayar dengan dana otsus
- Dinas Kesehatan: stunting tinggi, perlu sinergi lintas OPD, ada kegiatan yang gagal tender
- Dinas Perumahan: rumah layak huni harus diarahkan ke lokus stunting
- Dinas Catatan Sipil : data OAP belum maksimal by name by address, namun harus ada keselaran jumlah data yang di kabupaten dan pusat

7) Data Perencanaan

- Validitas data OAP krusial
- Perlu pemisahan data OAP vs non-OAP untuk pengukuran IPM/IMM
- RPJMD 2025–2029 harus sinkron dengan RAP3/RIPPP dan RPJMN
- Regulasi afirmasi 1% agar tidak multitafsir auditor
- Fokus ke program langsung menyentuh masyarakat OAP
- Kurangi belanja fisik berisiko
- Perkuat sinkronisasi lintas OPD agar tidak terjadi duplikasi program (contoh: makanan stunting)

d. Rencana Tindak Lanjut

1) Pengelolaan Anggaran dan Silpa

- Menekan SILPA agar alokasi tahun berikutnya dapat ditingkatkan
- Memastikan perencanaan kegiatan sesuai kapasitas serapan OPD untuk mengurangi risiko gagal tender

2) Penyelesaian Laporan Tahunan

- Mendorong seluruh OPD agar laporan tahunan Dana Otsus rampung paling lambat bulan Maret, desuai dengan regulasi
- Menyusun timeline internal monitoring di bawah koordinasi Bappeda dan Inspektorat

3) Penguatan Aparatur dan Regenerasi OAP

- Melaksanakan pembinaan berkelanjutan terhadap SDM OAP yang menduduki jabatan struktural agar lebih kompeten
- Menyusun program regenerasi kader OAP di OPD

4) Isu Teknis dan Adminstrasi

- Melakukan koordinasi teknis dengan Kemenkeu terkait kendala **PMK 33/2024** dan format review manual
- Mengusulkan penyediaan server wilayah timur (Makassar/Jayapura) untuk percepatan input SIPD

5) Peran Inspektorat/APIP

- Menyusun program kerja Inspektorat agar tidak hanya administratif tetapi substantif
- Memasukkan fungsi pengawasan Dana Otsus dalam PKPT 2026 sebagai dasar penganggaran

6) Data dan Perencanaan

- Memperkuat integrasi data OAP by name by address antara Capil, BPS, dan Pusat.
- Menyelaraskan RPJMD 2025–2029 dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN.

e. Rekomendasi

1) Anggaran dan Efisiensi

- OPD perlu menetapkan target output yang realistis, bukan hanya fokus pada realisasi anggaran
- Kurangi belanja yang berisiko jika terdapat keterlambatan salur dan perkuat program yang menyentuh langsung masyarakat OAP



- 2) Sarana dan Prasarana
 - Dinas Perumahan diarahkan untuk menyalurkan rumah layak huni pada lokus stunting
 - Sarana dasar kesehatan (transportasi, air bersih, listrik cadangan) harus menjadi prioritas Dana Otsus
- 3) Layanan dan program prioritas
 - Dinas Kesehatan perlu memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan stunting
 - Penanganan ODGJ harus diintegrasikan dengan Dinas Sosial
- 4) Penguatan SDM
 - Pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan, sosial, dan pendidikan di daerah 3T
 - Menjamin keberlanjutan program regenerasi OAP
- 5) Kebijakan Regulasi
 - Segera menetapkan regulasi untuk alokasi dana otsus 1% agar tidak multitafsir auditor
 - Menetapkan regulasi daerah (Perda/SK Bupati) terkait pengakuan fungsi pendidikan & kesehatan lintas

f. Dokumentasi Kegiatan



4. Kunjungan Kerja ke Inspektorat Kabupaten Boven Digoel

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 dan bertempat di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Boven Digoel.

b. Peserta Kegiatan

- Inspektur
- Tim Inspektorat Kabupaten Boven Digoel
- Anggota Pokja Papua Sehat
- Anggota Pokja Papua Cerdas

c. Hasil Kegiatan

1) Peran Inspektorat dalam Pengawasan

Fungsi utama Inspektorat adalah mendampingi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program daerah Karena keterbatasan anggaran dan SDM Inspektorat menjalankan pengawasan lebih dominan review dokumen.

2) Tanggapan dan Kendala

Anggaran pengawasan masih sangat terbatas
Jumlah auditor masih sangat kurang untuk 22 OPD

3) Implikasi Lintas Sektor

Kesehatan: dana Otsus masih digunakan untuk belanja rutin
Pendidikan: Fokus pada pembangunan fisik
Infrastruktur: Perencanaan dan realisasi tidak selalu sinkron
Sosial: penyaluran bantuan belum tertib administrasi

d. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pengawasan Inspektorat
- 2) Mendorong penambahan jumlah auditor dan peningkatan kapasitas SDM
- 3) Memperluas ruang lingkup pengawasan sampai pada pekerjaan fisik



- 4) Menyusun mekanisme sinkronisasi penggunaan Dana Otsus dengan sumber lain untuk alokasi anggaran bagi inspektorat
 - 5) Membentuk forum koordinasi rutin antara Inspektorat, OPD, dan pemangku kepentingan
- e. Rekomendasi
- 1) Penguatan Peran Inspektorat Daerah:
Pemerintah Daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran agar Inspektorat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, tidak hanya sebatas review dokumen tetapi juga pemeriksaan fisik di lapangan.
Penambahan SDM auditor yang proporsional dengan jumlah OPD dan luas wilayah menjadi prioritas.
 - 2) Integrasi Pengawasan dengan Kebijakan Otsus
Inspektorat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program Dana Otsus di seluruh OPD.
 - 3) Sinkronisasi dan Efisiensi Belanja
Prioritas belanja Dana Otsus harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar belanja rutin
 - 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
Pemerintah Daerah bersama DPRD didorong untuk menerbitkan regulasi turunan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Inspektorat dalam pengawasan Dana Otsus. Implementasi PMK 33 Tahun 2024 perlu dipertegas agar anggaran pengawasan dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk mendukung tugas Inspektorat.
 - 5) Forum Koordinasi Lintas Sektor
Dibentuk forum koordinasi rutin antara BP3OKP, Inspektorat, OPD, dan DPRD untuk membahas hasil pengawasan, tindak lanjut, serta rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

f. Dokumentasi Kegiatan



5. Kunjungan Kerja BP3OKP Papua Selatan ke Puskesmas Tanah Merah

a. Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada 15 Agustus 2025 di Puskesmas Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.



b. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini adalah Pokja Papua Sehat dan Kepala puskesmas tanah merah dan jajaran tenaga kerja

c. Hasil Kegiatan

1) Pendanaan dan Oprasional

- Dana operasional Puskesmas relatif kecil (\pm Rp26 juta/tahun), jauh di bawah kebutuhan riil.
- Dana kapitasi JKN sebagian besar (60%) dialokasikan untuk jasa pelayanan, sisanya terbatas untuk operasional
- Dana Otsus masuk melalui Dinas Kesehatan, tidak langsung ke Puskesmas

2) Program Kesehatan Ibu dan Anak

- Pelayanan pemeriksaan kehamilan sebagian besar sudah mengikuti standar 6 kali kunjungan.
- Kendala utama: keterbatasan sarana Posyandu (sering masih menggunakan rumah warga), keterbatasan transportasi, serta faktor budaya melahirkan di rumah.

3) Program Imunisasi dan Gizi

- Pelaksanaan imunisasi berjalan, namun hanya dikerjakan oleh sedikit tenaga.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan susu masih bergantung pada dropping dari Dinas.
- Ditekankan perlunya edukasi masyarakat terkait sumber dana (Otsus/DAK) agar masyarakat memahami manfaat Otsus.

4) Penanganan Penyakit Menular

- Malaria dan TB masih menjadi masalah utama
- Terdapat kendala dalam mekanisme rujukan laboratorium TB (TCM) karena keterbatasan transportasi dan waktu tunggu hasil pemeriksaan yang lama

5) Kader dan Posyandu

- Posyandu belum optimal karena keterbatasan jumlah kader aktif
- Sering kali hanya kader puskesmas yang hadir, sementara kader dari PKK/KB tidak maksimal
- Insentif kader (\pm Rp600 ribu/bulan) sering tidak memadai dan tidak rutin

6) SDM dan Sarpras

- Tenaga kesehatan di Puskesmas Tanah Merah sebagian besar masih honorer/PPPK
- Fasilitas sudah tersedia namun operasionalnya sering terkendala keterbatasan anggaran rutin
- Sudah pernah di bangun puskesmas prototipe kemenkes namun terkendala masalah pembebasan tanah sehingga Gedung tersebut tidak bisa difungsikan

d. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel untuk meninjau kembali proporsi alokasi dana operasional
- 2) Penguatan peran Posyandu melalui integrasi lintas kader (PKK, KB, Puskesmas)
- 3) Advokasi kebutuhan transportasi dan sarana Posyandu (bangunan khusus, bukan rumah warga) kepada Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk pemanfaatan dana kampung untuk pembangunan balai tempat posyandu
- 4) Penekanan edukasi kepada masyarakat mengenai sumber pendanaan program kesehatan agar manfaat Dana Otsus lebih dirasakan
- 5) Kepada Pemerintah Daerah terkait penyelesaian lahan tempat dibangun nya puskesmas protipe kemenkes sehingga bangunan itu bisa di fungsikan



e. Rekomendasi

1) Pendanaan:

- Perlu penambahan alokasi dana operasional Puskesmas, minimal setara kebutuhan dasar (Wi-Fi, listrik, logistik harian)
- Optimalisasi dana kapitasi JKN agar tidak terlalu berat pada jasa pelayanan

2) Layanan Kesehatan Dasar:

- Penguatan program ANC (Antenatal Care) dengan pendekatan budaya lokal
- Peningkatan kualitas layanan imunisasi dengan menambah tenaga vaksinator

3) Penguatan Posyandu:

- Insentif kader perlu ditinjau kembali agar kader non-kesehatan (PKK/KB) lebih aktif
- Fasilitas Posyandu harus didukung sarana permanen, bukan lagi rumah warga

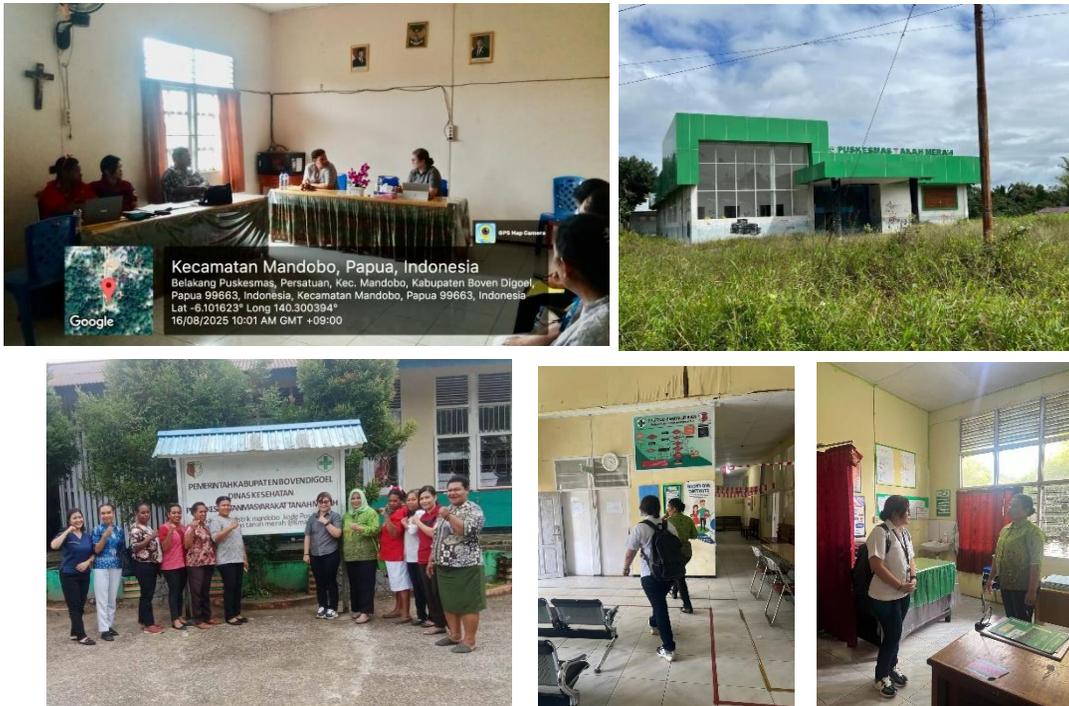
4) Koordinasi Rujukan:

- Perbaiki sistem rujukan TB dan malaria melalui koordinasi erat dengan RSUD dan Dinas

5) Kebijakan SDM:

- Perlu percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK/ASN
- Penambahan insentif tenaga kesehatan berbasis beban kerja dan lokasi terpencil

f. Dokumentasi Kegiatan



6. Kegiatan Seminar Lokakarya Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola Dana Otsus Papua Selatan

a. Waktu Kegiatan

- Hari/Tanggal: Rabu-Jumat, 20 -22 Agustus 2025
- Waktu: 08.30 WIT – Selesai
- Tempat: Swiss-Belhotel, Merauke
- Penyelenggara: KPK RI dan GIZ, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BP3OKP Papua Selatan

b. Peserta Kegiatan

Peserta terdiri dari:

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Selatan
- Perwakilan 4 DOB Kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat)
- Anggota DPRD
- Inspektorat Daerah
- Akademisi



- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Tokoh masyarakat
- Narasumber Utama:
 - Kasatgas Korwil V Kdeputian Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
 - Gubernur Papua Selatan
 - Kepala BP3OKP Papua Selatan
 - Perwakilan kementerian Keuangan Republik Indonesia
 - Perwakilan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - Perwakilan kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 - Perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua

c. Hasil Kegiatan

1) **Rabu 20 Agustus 2025:**

- Gubernur Papua Selatan membuka kegiatan dengan menegaskan Dana Otsus adalah amanah rakyat yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel
- KPK (Korwil Satgas Wilayah V & Direktorat Pencegahan) menekankan pentingnya pencegahan dan koordinasi sistem, serta perlunya transparansi publik dan penguatan pengawasan sejak perencanaan
- Bappenas menyoroti evaluasi Otsus Jilid I yang belum optimal, dan mendorong harmonisasi regulasi melalui RIPP & RAPP 2025–2029 dengan fokus Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif
- Kemendagri menekankan tata kelola Dana Otsus harus sesuai mekanisme APBD, serta pentingnya penguatan peran Inspektorat Daerah (APIP) dengan dukungan alokasi maksimal 1% Dana Otsus
- Isu Utama Diskusi:
 - Regulasi masih multitafsir → perlu harmonisasi lewat RIPP & RAPP
 - RAPBD terlambat → penyaluran Dana Otsus molor → perlunya disiplin timeline
 - Inspektorat lemah → dapat diperkuat dengan dukungan Dana Otsus 1% sehingga peran Inspektorat sebagai APIP menjadi maksimal mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.
 - Transparansi publik harus diperluas agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan Dana Otsus.

2) **Kamis 21 Agustus 2025 :**

- Kepala BP3OKP menekankan peran strategis BP3OKP melalui fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) serta mengkritisi regulasi yang multitafsir dan keterlambatan RAPBD.
- Kementerian Keuangan menyoroti keterlambatan perencanaan dan RAPBD yang membuat penyaluran Dana Otsus tidak tepat waktu serta menimbulkan silpa.
- LKPP memaparkan masalah *pinjam bendera* dalam PBJ dan perlunya afirmasi kebijakan serta peningkatan kapasitas kontraktor OAP melalui revisi Perpres PBJ.
- BPKP menegaskan pentingnya indikator kinerja dan pengendalian internal agar Dana Otsus berdampak nyata.
- Kemendagri (Dukcapil) mengungkapkan validasi data OAP baru dan mendorong Pemda menyusun Perbup untuk pendataan yang lebih akurat.
- Isu utama diskusi :
 - Sistem aplikasi SIPD/SiKD sering lambat, menghambat pencairan hingga 2–3 minggu.
 - Dana efisiensi (sisa kontrak) belum jelas aturannya → perlu regulasi teknis.
 - Praktik “pinjam bendera” kontraktor OAP marak → butuh afirmasi & pelatihan.
 - Data OAP ganda dan tidak valid → perlu Perbup dan integrasi dengan pusat.



- SDM OPD masih terbatas → butuh pendampingan dan pelatihan teknis.

3) **Jumat 22 Agustus 2025 :**

- Kegiatan inti: peserta dibagi dalam kelompok FGD untuk membahas isu strategis, (1) regulasi & sanksi, (2) pendataan OAP, (3) koordinasi BP3OKP–Pemda, (4) transparansi & partisipasi publik.
- Hasil pleno: tiap kelompok mempresentasikan *action plan* berisi masalah, tujuan, indikator, penanggung jawab, dan timeline.
- Poin menonjol: RAPBD terlambat, data OAP belum valid, sistem SIPD/SiKD lambat, evaluasi pusat tidak konsisten, kapasitas SDM masih terbatas.
- Komitmen bersama: memperkuat regulasi daerah (Perbup/Perda), memperjelas mekanisme koordinasi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memperluas transparansi publik.
- Isu utama diskusi:
 - Regulasi pusat multitafsir: evaluator berbeda hasil → butuh pedoman baku bersama.
 - Koordinasi BP3OKP–Pemda: disepakati diformalkan sebagai rapat rutin periodik.
 - Kapasitas SDM OPD: masih rendah → perlunya modul pelatihan teknis.
 - Transparansi dana Otsus: perlu papan proyek, publikasi daring, melibatkan LSM.
 - Pendataan OAP: tanggung jawab Pemda melalui Perbup, hasil integrasi ke Dukcapil pusat.

4) **Rencana Tindak Lanjut**

- Regulasi & Perencanaan
 - Pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah untuk validasi dan pendataan Orang Asli Papua (OAP).
 - OPD provinsi dan kabupaten mempercepat penyusunan RAPBD agar selesai sebelum tahun berjalan, dan laporan akhir tahun di ajukan sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh regulasi sehingga penyaluran Dana Otsus tidak terlambat.
- Pengawasan & Inspektorat
 - Mengalokasikan anggaran yang maksimal yang bisa diambil dari Dana Otsus 1% untuk mendukung fungsi pengawasan Inspektorat Daerah (APIP).
 - Penguatan peran Inspektorat agar aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.
- Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - LKPP mempercepat revisi Perpres PBJ untuk memberi afirmasi kepada kontraktor OAP.
 - Pemda bersama LKPP dan BP3OKP menyusun program peningkatan kapasitas kontraktor lokal.
- Sistem & SDM
 - Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP memperkuat sistem aplikasi SIPD/SIKD/SIPPP agar lebih cepat, stabil dan terintegrasi.
 - Pelatihan terpadu bagi aparatur daerah (OPD) untuk peningkatan SDM
- Koordinasi & Transparansi
 - BP3OKP bersama Pemda menjadwalkan rapat koordinasi periodik untuk monitoring implementasi Dana Otsus.
 - Pemda menerapkan mekanisme publikasi anggaran dan papan informasi proyek untuk memperluas transparansi dan melibatkan masyarakat sipil.

5) **Rekomendasi**

- Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten):
 - Segera menyiapkan Perda pendataan OAP, mempercepat RAPBD, serta memperkuat Fungsi Inspektorat.
 - Melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan Dana Otsus melalui forum konsultasi publik.



- Untuk BP3OKP Papua Selatan:
 - Mengoptimalkan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) dalam mendampingi Pemda.
 - Melakukan koordinasi lintas sektor secara berkala.
- Untuk Kementerian/Lembaga (KPK, Kemenkeu, Kemendagri, LKPP, BPKP, Bappenas):
 - Menyediakan panduan regulasi yang seragam untuk menghindari multitafsir.
 - Mendukung penguatan kapasitas aparatur daerah, serta memastikan keberlanjutan program pendampingan.
 - Menyelesaikan revisi regulasi PBJ dan memperbaiki sistem SIPD/SIKD/SIPPP

6) Dokumentasi Kegiatan



7. Workshop Penyusunan Pedoman Partisipasi Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan

a. Jadwal Kegiatan

- **Hari/Tanggal:** 28–29 Agustus 2025
- **Tempat:** [lokasi sesuai undangan Sekda Pemprov]
- **Penyelenggara:** Pemerintah Provinsi Papua Selatan, didukung mitra pembangunan.

b. Peserta Kegiatan :

Perangkat Daerah terkait (Bappeda, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, PPPA), BP3OKP, (Anggota Pokja Paua Sehat), organisasi perempuan, tokoh adat, penyandang disabilitas, akademisi, dan mitra pembangunan.

c. Hasil Kegiatan

➤ Paparan Pemerintah Provinsi Papua Selatan

- Komitmen Pemprov memasukkan kelompok rentan dalam RPJMD 2025–2029.
- Praktik musrenbang tematik di kabupaten sebagai model awal.

➤ Materi Teknis

- Definisi dan kategori kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat/OAP, komunitas perbatasan).
- Mekanisme musrenbang tematik untuk kelompok rentan.
- Pentingnya data terpilah untuk mendukung intervensi program.



➤ **Hasil Diskusi & Isu Strategis**

• **Definisi Kelompok Rentan**

- ✓ Perempuan: tidak dikotakkan per kasus, tapi secara umum mencakup ibu hamil/menyusui, pekerja informal, dan yang terdampak kekerasan.
- ✓ Anak: kelompok dengan perlindungan penuh, prioritas pada pencegahan kekerasan dan akses pendidikan/gizi.
- ✓ Disabilitas: hak layanan dasar setara, perlu data yang lebih terpilah.
- ✓ Masyarakat Adat/OAP: kerentanan terkait akses layanan dasar, terutama di perbatasan.

• **Permasalahan Utama yang sering muncul terkait kelompok rentan**

- ✓ Tingginya angka kematian ibu & stunting
- ✓ Kekerasan terhadap perempuan & anak.
- ✓ Rendahnya literasi/numerasi perempuan, termasuk di perkotaan.
- ✓ Rendahnya partisipasi kelompok rentan dalam musrenbang.

• **Mekanisme Partisipasi**

- ✓ Perlu musrenbang tematik dari kampung → distrik → kabupaten → provinsi.
- ✓ Pemetaan organisasi lokal/LSM untuk memperkuat partisipasi

d. **Rencana Tindak Lanjut**

- Penyusunan pedoman partisipasi kelompok rentan berbasis RIPPP & RPJMN.
- Penugasan OPD untuk mengintegrasikan isu rentan ke program sektoral.
- Pemetaan data terpilah (gender, usia, disabilitas, OAP).
- Penguatan kapasitas kelompok rentan melalui sosialisasi & pendidikan publik.
- Mendorong Pemprov untuk menetapkan musrenbang tematik kelompok rentan di kabupaten

e. **Rekomendasi**

- Menetapkan kelompok rentan secara inklusif (perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat/OAP, dan komunitas perbatasan).
- Memperkuat peran OPD teknis dan Bappeda dalam mengawal isu kelompok rentan.
- Memastikan partisipasi bermakna melalui forum tematik khusus.

f. **Dokumentasi**





C. Pokja Papua Cerdas

Rincian pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP-PPS, bulan Agustus tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Kegiatan Kunjungan Kerja dan FGD pada Kabupaten Boven Digoel

a. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Waktu dan Peserta kegiatan yang terlibat dari BPP-PPS dalam penugasan sesuai dengan surat tugas Nomor ST-119/SETBPP/JYP/2025 kegiatan tersebut, adalah :

➤ Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Waktu : Minggu, 11/8 s/d Minggu, 17/8 2025

Tempat : Kabupaten Bouven Digoel

➤ Peserta Kegiatan

a) Anggota BPP PPS :

Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC

b) Anggota POKJA Papua Cerdas dan Sehat :

Ir. Frederik Haryanto Sumbung, ST., M.Eng;
dr. Ira Nova Olivia Joyangkay

c) Pendampin :

Viko Ananta, SH

b. Output Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja pada Kabupaten Boven Digoel, terurai sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten khususnya pada program yang merupakan kewenangan provinsi, namun penerima manfaatnya beririsan dengan program pada dinas pendidikan kabupaten.
- 2) Kondisi asrama pada sekolah-sekolah di Kabupaten Boven Digoel dalam kondisi memprihatinkan, dan sampai saat ini tidak ada alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk melakukan rehabilitasi/perbaikan bangunan-bangunan tersebut.
- 3) Adanya program persiapan dan penyediaan SDM tenaga guru Orang Asli Papua yang difasilitasi oleh dinas pendidikan Kab. Boven Digoel melalui penempatan lanjut studi siswa lulusan SMP ke KPG Khas Papua sebanyak 10 orang.
- 4) Masih terdapat sekolah-sekolah tertinggal yang berada di kampung-kampung terpencil yang sangat sulit dijangkau seperti yang terletak di sekitar distrik Ambatkiwi, Yanirumah dan Kombay, hal ini berdampak pada setiap mengalami peningkatan angka putus sekolah akibat tidak adanya jenjang pendidikan lanjutan yang tersedia.
- 5) Permasalahan tingginya biaya transportasi bagi tenaga guru (PNS dan Non PNS) yang bertugas di kampung-kampung terpencil, yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi guru. Salah satu dampak nyata yaitu saat pengambilan gaji dilakukan 1 tahun 1 kali.
- 6) Penentuan HLS dan RLS masih bersumber dari data BPS yang merupakan data sampling, sehingga besaran HLS dan RLS belum merupakan angka riil berdasarkan data siswa by name by adress.
- 7) Belum adanya koordianasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan Kab. Boven Digoel dan Dinas Sosial Kab. Boven Digoel terkait dengan pendirian sekolah rakyat.
- 8) Persoalan meningkatnya penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda usia sekolah, berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah. Perlu adanya perhatian dari dinas provinsi dalam penanganan persoalan tersebut.



- 9) Penanganan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) belum dapat terealisasi secara maksimal di Kabupaten Boven Digoel, disebabkan karena belum ada harmonisasi antara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten.

c. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan tindaklanjut kegiatan Kunjungan Kerja pada Kabupaten Boven Digoel, adalah terurai sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan Pemerintah Daerah melakukan pertemuan bersama dinas pendidikan provinsi Papua Selatan, 4 Dinas Pendidikan selingkung PPS dan OPD yang terkait untuk memperjelas dan mempertegas integrasi dan sinergitas program sesuai kewenangan dan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku
- 2) Mengarahkan untuk dimasukkan ke dalam program anggaran daerah Kab. Boven Digoel sesuai dengan OPD terkait
- 3) Siapkan program usulan Formasi untuk periode berjalan dan selanjutnya khusus peserta didik OAP untuk memenuhi kebutuhan guru dari daerah/kampung asal
- 4) Program peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang termudah diakses
- 5) Memberikan fasilitas kendaraan dinas sesuai jalur/lintasan transportasi
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana IT untuk digunakan bersama oleh aparat kampung, sekolah, layanan medis, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam mengupdate data anak usia sekolah kedalam sistem yang tersedia.
- 7) Mengarahkan pimpinan daerah agar menginstruksikan adanya kolaborasi antara ke 2 dinas terkait, dalam pelaksanaan pendirian dan pengoperasian Pendidikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Boven Digoel.
- 8) Mengarahkan Pemerintah agar bekerja sama dengan pihak berwajib untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dalam penanganan Narkoba agar tidak berlangsung terus menerus, sehingga berdampak pada pembunuhan generasi muda secara masiv
- 9) Mengarahkan pemda untuk menyusun perda tentang PLS agar segera ditindaklanjuti dan meminta pertimbangan K/L untuk menerbitkan permen terkait PLS

d. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Kegiatan





Dokumentasi Kegiatan



2. Kegiatan Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi Dalam Tata Kelola Dana Otsus

a. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Waktu dan Peserta kegiatan yang terlibat dari BPP-PPS dalam penugasan sesuai dengan surat tugas Nomor ST-5/SETBPP/MRK/2025 kegiatan tersebut, adalah :

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
 - Waktu : Rabu-Jumat, 20-22 Agustus 2025
 - Tempat : Swiss-Belhotel, Merauke
- Peserta Kegiatan
 - Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS
- Penyelenggara Kegiatan
 - KPK RI & GIZ, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BP3OKP Papua Selatan
- Narasumber
 - Kasatgas Korwil V Kdeputian Korsup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
 - Gubernur Papua Selatan
 - Kepala BP3OKP Papua Selatan
 - Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 - Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
 - Perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
 - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua.

b. Output Kegiatan

- 1) Regulasi masih multitafsir → perlu harmonisasi lewat RIPPP & RAPPP.
- 2) RAPBD terlambat → penyaluran Dana Otsus molor → perlunya disiplin timeline.
- 3) Inspektorat lemah → dapat diperkuat dengan dukungan Dana Otsus 1%C sehingga peran Inspektorat sebagai APIP menjadi maksimal mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.
- 4) Transparansi publik harus diperluas agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan Dana Otsus.
- 5) Sistem aplikasi SIPD/SiKD sering lambat, menghambat pencairan hingga 2–3 minggu.
- 6) Dana efisiensi (sisa kontrak) belum jelas aturannya → perlu regulasi teknis.
- 7) Praktik “pinjam bendera” kontraktor OAP marak → butuh afirmasi & pelatihan.
- 8) Data OAP ganda dan tidak valid → perlu Perbup dan integrasi dengan pusat.



- 9) SDM OPD masih terbatas → butuh pendampingan dan pelatihan teknis.
 - 10) Regulasi pusat multitafsir: evaluator berbeda hasil → butuh pedoman baku bersama.
 - 11) Koordinasi BP3OKP–Pemda: disepakati diformalkan sebagai rapat rutin periodik.
 - 12) Kapasitas SDM OPD: masih rendah → perlunya modul pelatihan teknis.
 - 13) Transparansi dana Otsus: perlu papan proyek, publikasi daring, pelibatan LSM.
 - 14) Pendataan OAP: tanggung jawab Pemda melalui Perbup, hasil integrasi ke Dukcapil pusat.
- c. Rekomendasi dan Tindaklanjut
- 1) Rekomendasi
 - Untuk Pemerintah Daerah (Provinsi & Kabupaten):
 - Segera menyiapkan Perda pendataan OAP, mempercepat RAPBD, serta memperkuat Fungsi Inspektorat
 - Melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan Dana Otsus melalui forum konsultasi publik.
 - Untuk BP3OKP Papua Selatan:
 - Mengoptimalkan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi) dalam mendampingi Pemda.
 - Melakukan koordinasi lintas sektor secara berkala.
 - Untuk Kementerian/Lembaga (KPK, Kemenkeu, Kemendagri, LKPP, BPKP, Bappenas):
 - Menyediakan panduan regulasi yang seragam untuk menghindari multitafsir.
 - Mendukung penguatan kapasitas aparatur daerah, serta memastikan keberlanjutan program pendampingan.
 - Menyelesaikan revisi regulasi PBJ dan memperbaiki sistem SIPD/SIKD/SIPPP
 - 2) Tindak Lanjut
 - Regulasi & Perencanaan
 - Pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah untuk validasi dan pendataan Orang Asli Papua (OAP).
 - OPD provinsi dan kabupaten mempercepat penyusunan RAPBD agar selesai sebelum tahun berjalan, dan laporan akhir tahun di ajukan sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh regulasi sehingga penyaluran Dana Otsus tidak terlambat.
 - Pengawasan & Inspektorat
 - Mengalokasikan anggaran yang maksimal yang bisa diambil dari Dana Otsus 1% untuk mendukung fungsi pengawasan Inspektorat Daerah (APIP).
 - Penguatan peran Inspektorat agar aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan..
 - Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - LKPP mempercepat revisi Perpres PBJ untuk memberi afirmasi kepada kontraktor OAP.
 - Pemda bersama LKPP dan BP3OKP menyusun program peningkatan kapasitas kontraktor lokal.setahun dengan notulen dan rencana aksi yang jelas.
 - Sistem & SDM
 - Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP memperkuat sistem aplikasi SIPD/SIKD/SIPPP agar lebih cepat, stabul dan terintegrasi.
 - Pelatihan terpadu bagi aparatur daerah (OPD) untuk peningkatan SDM.
 - Koordinasi & Transparansi
 - BP3OKP bersama Pemda menjadwalkan rapat koordinasi periodik untuk monitoring implementasi Dana Otsus.
 - Pemda menerapkan mekanisme publikasi anggaran dan papan informasi proyek untuk memperluas transparansi dan melibatkan masyarakat sipil



e. Dokumentasi Kegiatan



3. Kegiatan Rapat Satu Data (500.8/734.C/SETDA/VIII/2025)

a. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Waktu dan Peserta kegiatan yang terlibat dari BPP-PPS dalam penugasan sesuai dengan surat tugas Nomor ST-137/SETBPP/JYP/2025 kegiatan tersebut, adalah : :

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
 - Waktu : Rabu-Kamis, 27-28 Agustus 2025
 - Tempat : Hotel Halogen Merauke
- Peserta Kegiatan
Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, dan Pimpinan OPD PPS

b. Output Kegiatan

- 1) Usulan adanya Pergub satu data Propinsi Papua Selatan
- 2) Belum adanya data yang valid dari Produsen Data
- 3) Kabupaten Merauke sudah menggunakan Serious dan aplikasi serious tidak menghilangkan data yang lain.
- 4) Sistem yang dibangun berdasarkan peraturan yang menyesuaikan dengan kultur sehingga terkait data yang diinput harus lengkap pada setiap orang
- 5) Sistem pada OPD Wajib terintegrasi dengan pusat data
- 6) Persoalan nama suku, marga yang belum terinput pada sistem harus melihat jumlah suku dan marga pada masing-masing wilayah dan perlu adanya kajian etnografi pemetaan suku-suku di wilayah PPS bersama Akademisi
- 7) Belum semua OPD memiliki Website, dan disarankan semua OPD memiliki website agar memudahkan integrasi data dalam proses penyusunan program yang tepat sasaran.
- 8) Peran BPS sebagai pembina data statistik pada sistem data Indonesia (SDI)
- 9) Pentingnya Daftar data prioritas yang tersedia setiap tahun untuk mendukung penyelarasan perencanaan pembangunan PPS
- 10) Perlunya data spasial pada tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten) untuk



mengetahui kapasitas, quantities dan kualitas masing-masing.

- 11) Dalam interoperabilitas data, sebaiknya gunakan data capil terlebih dahulu agar gtidak terjadi duplikasi data.
- 12) Aplikasi sistem satu terintegrasi terdiri dari SDPN, PORTAL, ALUR INTEGRASI PORTAL, APLIKASI PELITA, SDM, Kode (sesuai pemendagri 90) dan protokol integrasi data
- 13) Kebijakan Integrasi DTSEN berbasis data tunggal, dengan kegunaan DTSEN adalah:
 - Perencanaan kebijakan yang tepat sasaran
 - Efisiensi anggaran
 - Pengentasan kemiskinan
 - Mendukung program SDI
 - Monev
 - Dasar pengambilan keputusan multisektor untuk menentukan penerimaan beasiswa, mengatur subsidi energi (BBM/Listrik) dan dan mengatur ketimpangan wilayah.
- 14) Tindaklanjut pembahasan terkait satu data akan dibahas dalam Renaksi Forum Data jika sudah terbentuk, dengan susunan sebagai berikut :
 - BAPPEDA : Sek Forum Data
 - DISKOMINFO : Wali Data Utama
 - OPD/SKPD : Wali data Pendudkung
 - BPS : Pembina Data

c. Rekomendasi dan Tindaklanjut

- 1) Perlu adanya koordinasi dan arahan BP3OKP kepada MRP, DPR K Afirmasi dan Pemerintah daerah untuk menetapkan Perdasus terkait klasifikasi OAP
- 2) Terbentuknya Forum Data yang sudah diusulkan untuk ditetapkan dalam surat keputusan pemerintah daerah.
- 3) Perlunya pemenuhan kelengkapan Forum Data Papua Selatan terdiri atas Pergub tentang SDI PPS, SK Penyelenggara SDI PPS dan Pembentukan Forum Data PPS, Keputusan Gubernur tentang data prioritas PPS tahun 2025.
- 4) Daftar data dari masing-masing OPD dirilis dalam daftar data yang diserahkan ke Forum Data.

d. Dokumentasi Kaegiatan





Dokumentasi Kegiatan



VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kunjungan kerja, FGD, seminar, lokakarya, dan rapat koordinasi yang dilakukan di Kabupaten Boven Digoel, Merauke, serta dengan seluruh OPD Provinsi Papua Selatan telah memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, tata kelola dana otsus, dan integrasi data.

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan ini berhasil mengidentifikasi akar permasalahan dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti. **Temuan kunci** dari laporan ini antara lain adalah:

1. **Koordinasi dan Sinkronisasi Program** yang masih lemah antar level pemerintah (provinsi-kabupaten) dan antar OPD, menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan program yang tidak tepat sasaran.
2. **Kondisi infrastruktur pendidikan** di daerah terpencil, khususnya asrama, yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serta alokasi anggaran yang serius, ditambah dengan masalah akses transportasi yang parah bagi guru dan siswa.
3. **Tantangan dalam tata kelola Dana Otsus**, mulai dari regulasi yang multitafsir, keterlambatan penyaluran, kapasitas SDM yang terbatas, hingga lemahnya pengawasan dan transparansi yang berpotensi pada inefektivitas program dan kerentanan terhadap penyimpangan.
4. **Sistem data yang belum terintegrasi** dan tidak valid, menghambat proses perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan tepat sasaran, khususnya untuk memastikan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) berjalan optimal.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Oleh karena itu, **rekomendasi dan rencana tindak lanjut** yang telah dirumuskan dalam setiap kegiatan harus menjadi panduan utama bagi semua pemangku kepentingan. Keberhasilan pembangunan di Papua Selatan sangat bergantung pada **komitmen bersama, kolaborasi yang erat, dan implementasi yang konsisten** dari semua rekomendasi tersebut.

Sebagai langkah konkret, kami merekomendasikan agar:

1. **Pemerintah Daerah** segera memprioritaskan harmonisasi regulasi, memperkuat koordinasi lintas OPD, dan mengalokasikan anggaran untuk program-program kritikal



seperti rehabilitasi infrastruktur pendidikan, penguatan sistem data, dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.

2. **BP3OKP Papua Selatan** berperan lebih aktif sebagai fasilitator dan koordinator untuk memastikan sinkronisasi dan evaluasi program berjalan efektif, serta memediasi hubungan antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
3. **Kementerian/Lembaga terkait** memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan kepastian regulasi untuk mempercepat implementasi berbagai kebijakan afirmatif, memperbaiki sistem aplikasi keuangan (SIPD/SIKD), dan memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Dengan sinergi dan langkah nyata dari semua pihak, diharapkan hasil dari kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi katalis untuk percepatan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Boven Digoel.

Merauke, 10 September 2025

Kepada BP3OKP Provinsi Papua Selatan



Yoseph Yanawo Yolmen, S.Pd., M.Si., MRSC

NIP: 999920240117145257